



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota
SPSI Bekasi
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Selasa, 30 November 2010
Waktu : Pukul 11.45 WIB s/d selesai
Acara : Penyampaian pernyataan sikap tentang Penolakan Revisi UU Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Rapat : Ir. Abdul Aziz Suseno, MT/Ketua Pokja Naker Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 5 orang dari 19 Anggota Pokja Naker Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengan Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota SPSI Bekasi dibuka pukul 11.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Perwakilan Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota SPSI Bekasi menyampaikan pernyataan sikap berkaitan dengan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Pernyataan sikap yang disampaikan oleh Perwakilan Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota SPSI Bekasi, antara lain:
 - a. Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan versi Pemerintah yang dinilai semakin memperburuk nasib buruh.
 - b. Menuntut kepada pemerintahan SBY-Boediono untuk membatalkan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. Menuntut kepada DPR RI sebagai perwakilan rakyat agar tidak menyetujui rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - d. Mendesak segera diberlakukannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan agar DPR RI segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk disahkan menjadi Undang-undang.
 - e. Menyerukan kepada segenap lapisan buruh untuk melakukan perlawanan terhadap rencana revisi ini karena dianggap akan semakin menyengsarakan hidup kaum buruh.
3. Keberadaan UU Nomor 13 Tahun 2003 sampai dengan saat ini masih cukup relevan. Pihak pekerja mengharapkan adanya peningkatan pengawasan perburuhan, termasuk meningkatkan jumlah pengawas di lapangan, daripada melakukan revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 4. Informasi yang didapatkan dari pihak Kemnakertrans bahwa pihak Kemnakertrans RI tidak pernah mengeluarkan draft RUU tentang Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

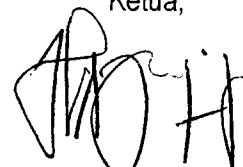
III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi dan menampung aspirasi dari Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota SPSI Bekasi kepada Komisi IX DPR RI mengenai penolakan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan usulan untuk segera melaksanakan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diusulkan tidak masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2011 yang diusulkan oleh Komisi IX DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 12.55 WIB

PIMPINAN POKJA NAKER KOMISI IX DPR RI

Ketua,



Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT